

DAFTAR BACAAN

- Apeldoorn, L.J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Asmara, Galang, Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (*Gijzeling*) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia, Cet. I, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006
- Asshidiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Bagijo, Himawan Estu, Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Makalah dalam Diskusi Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia yang diselenggarakan oleh BALITBANGDIKLAT Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surabaya, 2011
- Basah, Sjahran, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni Bandung, 1985
- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Busrooh, Abu Daud dan H. Abu Bakar Busro, Asas-Asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Hadjon, Philipun M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011
- H.R, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2002
- Hoesein, Zainal Arifin, Akuntabilitas Mahkamah Agung - Mahkamah Agung dan Pembaruan hukum, Cet.I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Huda, Ni Matul, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ibrahim, Johni, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet.III, Banyumedia Publishing, Malang, 2007
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Kansil, C. S. T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Manan, Bagir, Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945, Makalah Ilmiah Disampaikan Kepada Mahasiswa Pasca Sarjana UNPAD, 1994
- , Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), FH-UI Press, Jakarta, 2004
- , Menegakan Hukum Suatu Pencarian, Cet. I, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Andi, Yogyakarta, 2016
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- , Penelitian Hukum, Cet. VIII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- , Penelitian Hukum, Cet. VIII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

- Muchsin, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Kebijakan Asasi, STIH IBLAM, Jakarta, 2004
- Mujahidin, Ahmad, Peradilan Satu Atap Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Pandiangan, Roristua, Hukum Pajak, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012
- Saidi, Muhammad Djafar, Hukum Acara Peradilan Pajak, Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sangadji, Z.A., Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Santiago, Faisal, Akuntabilitas Mahkamah Agung - Mahkamah Agung Sebagai Benteng Terakhir (peradilan) Penegakan Hukum, Cet.I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sudiro, Ahmad, Akuntabilitas Mahkamah Agung – Quo Vadis Mahkamah Agung (Catatan Singkat Mahkamah Agung Sebagai Pemberi Pelayanan Hukum Yang Profesional dan berkeadilan), Cet. I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Sundoro. Dkk, Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak II, Cet. I, Semar Publishing, Jakarta, 2009
- Suseno, Frans Magnis, Etika Politik, Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Sutrisno, Deddy, Hakikat Sengketa Pajak, Kencana, Jakarta, 2016
- Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962
- Yamin, Muhammad, 1954, proklamasi dan konstitusi, Djakarta : Djambatan. dalam wahjudi djafar, 2010, menegaskan kembali komitmen negara hukum : sebuah catatan atas kecenderungan defisit negara hukum di indonesia, jurnal konstitusi vol.hlm7 no 5 oktober 2010, jakarta:mahkamah konstitusi RI
- Zainuddin, A.Rahman, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
- Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 Tentang Sekertariat Pengadilan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 206.01/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Pengadilan Pajak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016

Internet :

<http://kbbi.web.id/negara> diakses pada tanggal 07 Desember 2016 pada pukul 22.15 WIB

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22014/posisi-pengadilan-pajak-masih-menjadi-polemik> diakses pada tanggal 19 Desember 2016 pada pukul 13.00 WIB

<http://kbbi.web.id/pajak> diakses pada tanggal 06 Februari 2017 pada pukul 23.00 WIB